

Berpikir Sistem Pada Masifnya Gerakan Feminisme: Telaah Perang Narasi Digital di Timur Tengah

Tika Tazkya Nurdyawati

Faculty of Politics and Journalism Adam Mickiewicz Univerwity

e-mail : tika18002@mail.unpad.ac.id

Abstract

The equality agenda developing massively in the Western world is often transmitted gradually to the Middle East Region. In its early stages, feminism entered into a scientific methodology, paradigm, and concern. Then, feminism spread multidimensionally to the political realm. In the contemporary era, feminism exists as a movement facilitated by digitization. There are two camps as actors who are at war with each other in narratives: 1) feminists Muslim and 2). counter-feminist Muslim. This article aims to explore the roots of the differences in the premises of the two camps, which are equally legitimized by religious references. This article uses a qualitative method with a systems thinking framework attached to the mental model of the Causal Loop Diagram. This research refers to the theory of the narrative's ability to mobilize public opinion and produce war virtually. This article finds that there are different interpretation schemes between the two camps in religious understanding.

Keywords: digital movement, feminism, Middle East, narratives war, systems thinking

Abstrak

Agenda kesetaraan yang berkembang dengan masif di dunia Barat ditransmisikan secara bertahap ke Kawasan Timur Tengah. Pada tahap awal, feminisme masuk menjadi metodologi, paradigma dan hirauan saintis. Lalu, feminisme menjalar secara multidimensional hingga ranah politik. Di era kontemporer, feminisme hadir sebagai pergerakan yang difasilitasi oleh digitalisasi. Terdapat tiga kubu sebagai aktor yang saling berperang narasi: Feminisme sekuler, Feminis Muslim dan Muslim kontra-feminis (konservatif). Artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi akar perbedaan premis ketiga kubu yang dua di antaranya sama-sama dilegitimasi oleh rujukan agama. Artikel ini menggunakan metode kualitatif dengan kerangka berpikir sistem yang divisualisasikan dalam *Causal Loop*

Diagram. Penelitian ini merujuk pada Teori Perang Narasi dalam skema peperangan non-fisik secara virtual. Artikel ini menemukan adanya skema interpretasi yang berbeda dari kedua kubu Muslim dalam pemahaman agama, yakni pemurnian agama dan fleksibilitas tafsir agama sesuai arus modern.

Kata kunci: berpikir sistem, feminisme, pergerakan digital, perang narasi, Timur Tengah.

Pendahuluan

Wacana mengenai kesetaraan wanita mulai muncul di Timur Tengah seiring dengan masifnya suara dan sumbangsih literatur feminisme di kalangan muslim terpelajar. Isu kesetaraan ini hadir sebagai kajian multidimensi: masuk pada ranah ekonomi, budaya, pendidikan dan bahkan politik. Feminisme bertransmisi dari Barat (merujuk pada negara-negara demokrasi Eropa) yang menjadi tempat penetrasi gaungan hak asasi manusia. Hal tersebut membayangkan komunitas muslim untuk turut berpartisipasi mengikuti reformasi dunia (Sugiyono, 2013).

Gagasan kesetaraan dinilai penting dan perlu dikejar oleh dunia Timur agar terhindar dari terminologi ketertinggalan. Ambang status modernitas sebuah entitas negara juga mengukur tingkat pemberdayaan perempuan. Hak, partisipasi, status kedudukan, peran serta fungsi wanita dalam lingkup kultural dan tradisi perlahan mulai didiskusikan di kawasan Timur Tengah. Skema perkembangan ini bersifat bottom up (segitiga berbalik) karena semakin tinggi, luas dan menyebar di tengah masyarakat. Kasus yang disoroti mayoritas meliputi: perzinahan poligami, kemudahan perceraian, dan jumlah partisipasi wanita. Hal ini secara tidak langsung menyuguhkan titik balik sebuah tradisi dan aspek keagamaan yang telah lama berkembang di pusat peradaban Islam ini (Whitcher, 2005).

Mesir dan Turki merupakan negara terdahulu dalam jazirah Arab yang membawa isu kesetaraan ini. Diskursus mulai berkembang sejak Hifni Malak Nassef mempublikasikan tulisan dalam sebuah majalah yang memuat kritik tajam persoalan wanita. Periode ini berada dalam kurun waktu 1930-an. Nassef merupakan aktivis Timur Tengah – spesifiknya Mesir – yang paling vokal dan dijuluki “embrio” dalam hirauan divergen yang dibawanya. Gelombang feminisme di Mesir dan Turki yang berasal dari Barat dan mempermasalahkan pemakaian hijab sebagai urgensi feminisme, kini ditekankan oleh Nassef pada titik fokus keadaan perempuan yang menjadi korban opresi kaum pria (Jazzar, 2011).

Gerakan feminisme di Timur Tengah terbagi menjadi tiga gelombang: gelombang awal di abad 19, gelombang kedua di abad 20, dan gelombang ketiga adalah di abad 21 atau dikenal juga sebagai era digitalisasi. Gelombang pertama (abad 19) di Timur Tengah merupakan sebuah lanjutan fase yang panjang dari dunia Barat. Feminisme dibawa ke kawasan timur dengan isu nasionalisme, pembangunan, reformasi tatanan sosial, dan dialog kesetaraan. Feminisme tidak serta-merta hadir dalam skema pergerakan, melainkan menanamkan paradigma dan metodologinya terlebih dahulu kepada para akademisi. Hal ini direfleksikan dengan publikasi Sandra Harding (1986) yang berjudul *The Science Question in Feminism*. Metodologi feminis mulai masuk ke dalam kerangka ilmu sosiologi psikologi dan ilmu politik. Meski pada kurun waktu tersebut masih masih perdebatan mengenai keajegan epistemologi yang dibawanya (Harding, 1986).

Setelah para pembelajar atau akademisi Timur Tengah menerima metodologi ini, mereka mulai menilik komposisi asimetris di lapangan. Dengannya, kerangka feminisme mulai diimplementasikan. Pada tahapan ini, secara garis besar para feminis mulai merumuskan stigma patriarki, khususnya pada pelaksanaan norma keagamaan di negara Timur Tengah. Pembatasan mobilisasi dan peran perempuan menjadi esensi yang paling banyak menuai kritik (Kandiyoti et al., 1955).

Pada abad 20, feminisme mulai merebak ke ranah sosial politik yang cenderung berbentuk organisasi. Di negara Mesir, feminisme direpresentasikan dengan pendirian *Daughter of the Nile* (Bint el-Nile). Organisasi ini diketuai oleh Doria Shafik dengan komitmen bersama untuk menyuarkan hak politik perempuan. Beberapa penstudi mendefinisikan gejala sosial politik ini dengan era sekularisme di negara Muslim. Dimana gerakan dan partai politik yang menaungi isu feminisme, mulai bergerak di luar konteks Islam (Younis, 2007).

Di periode ini, sisi akademisi yang mengkaji Timur Tengah secara empiris melekatkan kemajuan feminisme dengan manifestasi orientalisme. Perspektif yang digunakan bersentral pada Barat. Para peneliti Barat dengan latar belakang kulturalnya mengkaji perempuan Timur Tengah dengan identitas muslimnya. Di era ini, Perang Dunia pun telah berakhir. Negara Timur Tengah satu persatu meraih kemerdekaannya. Isu feminisme bukan menjadi salah satu transmisi ideologi yang dibawa para penjajah lagi, melainkan lahir beriringan dengan nasionalisme yang digelar para pemimpin bangsa Timur Tengah. Dalam proses pembentukan kesatuan negaranya, peran, serta posisi wanita selalu diselipkan (Abu-Lughod, 2001).

Tahapan gelombang terakhir dalam isu feminisme di Timur Tengah adalah abad kontemporer (Abad 21) yang difasilitasi oleh pesatnya arus digital. Hal ini dapat dijuluki sebagai fase digital/komputerisasi. Berbeda dengan dua periode sebelumnya, pada

abad ini feminisme menjadi diskursus yang lebih luas dan lebih dalam diperbincangkan, seiring dengan lekatnya gawai setiap individu untuk menuangkan opini, posisi, dan strategi narasinya.

Di era ini, wacana feminis tidak lagi menekan tatanan yang ada atau melakukan suatu panggilan reformasi sosial politik, namun telah pada tahap perang narasi. Di zaman internet yang melewati dimensi spasial (ruang dan waktu), peta wacana suatu isu terlihat lebih jelas. Kubu feminisme dan kontra-feminis menjadi posisi paten dan menyuguhi perempuan Timur Tengah pilihan biner (pro-kontra) tersebut. Masing-masing kubu mengukuhkan narasi dan rasionalisasi yang dibawahnya dengan perkembangan dan kerangka historis yang mengonstruksinya (Boizot, 2019).

Dalam fase ketiga ini, agenda kesetaraan lebih direalisasikan pada semua lini kehidupan. Bahkan, gejala yang ada memastikan dalam setiap pemanfaatan perangkat lunak atau pengunduh memiliki indeks komposisi gender yang setara. Daya cipta perempuan, keterampilan digital, pekerjaan tinggi, isu-isu tersebut merupakan hal yang terus-menerus diakselerasi agar pembaharuan Sustainable Development Goals yang telah disepakati secara universal menjadi asas efisien pembangunan perempuan (OECD, 2018).

Terminologi perang narasi menjadi hal signifikan yang dapat menggambarkan bagaimana kubu aktivis feminisme dengan kubu konservatif non-reformis sama-sama mengukuhkan posisinya di media sosial. Dunia digital yang tidak terbatas seperti konsep kenegaraan juga didukung oleh individu non-Arab atau di luar Kawasan Timur Tengah. Gejala ini ditandai dengan banyaknya para jurnalis yang memenuhi media dengan bingkai isu kesetaraan, seperti: Layla Baalbaki, Assia Djebbar, Inaam Kachaci, Sahar Khalifeh, Fatema Mernissi, Nawal El-Saadawi, dan Hanan Al-Shaykh (Behrooz, 2016). Semakin menguatnya perdebatan feminisme di era ini menjadi urgensi tersendiri dan mendorong lahirnya dua pertanyaan; (1) Bagaimana narasi kesetaraan ini masif di Kawasan Timur Tengah? (2) Apakah perdebatan yang ada menggunakan interpretasi agama? Artikel ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut.

Terdapat berbagai publikasi terdahulu yang membahas perdebatan sengit antara pergerakan feminisme dan kontra-feminis di era digital (melalui social media), seperti: Digital Activism for Women's right in the Arab World (Sara, 2015), Twitter as Feminist Resource (Plummer & Barker, 2017), serta Empowering Women in the Digital Age (OECD, 2018). Meski demikian, belum terdapat artikel yang memanfaatkan pendekatan Berpikir Sistem dalam meninjau perdebatan dan dinamika perubahan kebijakan yang lebih kompleks. Artikel ini membahas tinjauan perubahan kebijakan di negara-negara Timur Tengah sejak dideklarasikan agenda universal kesetaraan, internet sebagai

platform perang narasi feminisme, serta konten narasi dengan membawa perspektif agama. Pembahasan artikel akan didasari dengan identifikasi kausalitas yang disajikan periset dalam Causal Loop Diagram.

Teori Perang Narasi

Narasi merupakan suatu instrumen di era kontemporer, terlebih dengan fasilitas internet yang mentransmisikan informasi dengan cepat. Merujuk pada buku *Strategic Narratives, Public Opinion, and War* bahwa narasi menjadi senjata kunci dalam beberapa perang domestik. Dalam perkembangan literatur Hubungan Internasional, hal ini dilekatkan dengan era post-truth yakni penggiringan fakta oleh pihak-pihak yang kuat. Dalam era ini, salah satu aktor yang paling berpengaruh adalah pemingkai dan repetisi dari pihak media. Berita yang disampaikan oleh media dapat mengonstruksi satu opini publik tunggal sehingga intersubjektivitas menjadi kebenaran (Colley, 2015).

Dalam skema perang (saling lawan), perang yang dimaksudkan bukanlah perang tradisional berupa kekerasan atau dengan penggunaan senjata, melainkan sebuah perang lebih lembut (ideasional) yang dinilai para tokoh justru lebih berbahaya. Perang narasi dapat menjadi penyebab terjadinya perang secara fisik. Sentralisasi argumen dapat membentuk dukungan publik akan pengangkatan senjata. Hal ini terjadi di sejumlah negara Timur Tengah. Beberapa narasi digaungkan dan dinamakan dengan istilah yang perlu diperjuangkan secara bersama, seperti “Keamanan Negara” (Dimitriu & de Graaf, 2015). Berikut merupakan komponen yang terdapat dalam sebuah perang narasi:

1. Konsistensi narasi. Narasi disyaratkan untuk memenuhi jalan cerita yang sama agar bisa memenangkan perang. Dua atau lebih narasi yang konsisten akan menciptakan komponen kedua, yakni
2. Kubu. Perang narasi dicirikan dengan dua kubu berbeda yang saling beradu argumen untuk mengajak massa berada dalam pihak salah satunya. Dalam dunia digital, perang narasi kini lebih mudah diidentifikasi. Melalui platform seperti: Twitter, Facebook, dan lainnya, narasi secara gamblang sangat lekat dan saling berbenturan.

Pada periode terdahulu, perang narasi lebih signifikan di arena tokoh-tokoh ahli penggagas teori. Kini, seluruh individu dibalik gawainya dapat bersuara menjadi representasi pendukung salah satu barisan narasi (baik pro maupun kontra). Di era digital yang difasilitasi sistem algoritma, narasi yang unggul dapat ditinjau dengan penggunaan tagar. Tagar yang masuk ke dalam nominasi teratas menunjukkan bahwa pihak tersebut lebih aktif, konsisten dan “menang” dalam narasinya (Bruer et al., 2012).

3. Psy-ops. Karakteristik dari narasi strategis adalah menggunakan kata-kata yang cenderung mengonstruksi propaganda atau bersifat persuasif. Istilah yang digunakan dalam fenomena ini adalah “psy-ops”.

Perang narasi bersifat sangat bias, karena oknum penggagas bisa bermain di belakang layar sedangkan massa telah terpengaruh. Dalam lingkup demokrasi, suara massa atau rakyat yang banyak perlu diakomodir. Dengannya, saat massa telah terpengaruh dalam suatu narasi maka kebijakan yang adapun perlu beradaptasi. Sisi bias lainnya berkaca pada aktor penggagas narasi, jika narasi digagas oleh entitas non-formal dan memiliki pengaruh yang kuat maka hal tersebut akan berpengaruh pada pihak militer, intel, bahkan pemangku keputusan (Rickli & Kaspersen, 2016).

Tahapan perang narasi di era digital bertolak belakang dengan masa sebelum internet hadir. Di masa ini, langkah-langkah sebuah narasi dapat unggul mendominasi adalah dengan konsistensi mengunggahnya pada platform yang ada.

4. Platform. Media sosial memiliki kapasitas interaktif, tinggi jangkauan, dan frekuensi impresi yang memberi ruang tanpa limit spasial untuk menyampaikan pesan dalam berbagai bentuk, di antaranya; foto, audio maupun tulisan. Dalam tahapan ini, sebuah kubu narasi berlomba untuk membungkus pesan dengan konten yang menarik. Sehingga dalam keterbatasan waktu, massa yang ditargetkan dapat berempati pada isu tersebut. Selain pengemasan konten, strategi pembentukan narasi adalah dengan menyuarakan hal yang membuat massa terkejut disertai iming-iming keuntungan para individu untuk turut berpartisipasi. Hal ini terjadi pada narasi yang dibawa oleh organisasi ISIS (Kruglova, 2020).

Merujuk pada Fanenbruck (2010), terdapat syarat sebuah narasi diklasifikasikan sukses dalam kontestasi ‘perang’:

1. Interaktivitas, narasi yang unggul cenderung bersifat dua arah. Terdapat pertanyaan-pertanyaan yang diakomodir kemudian terjawab. Terdapat transmisi pengaruh dan diskusi pemikiran dengan argumentasi yang kuat.
2. Mobilisasi. Tatanan dunia internasional semula hanya hirau pada isu-isu politik tinggi (high politics), seperti militer dan diplomasi. Namun seiring berjalannya

waktu, para pihak turut sadar mengenai ancaman politik rendah (low politics). Di antara faktor suksesi kajian politik rendah menaruh perhatian berbagai stakeholder adalah karena mobilisasinya yang kuat.

3. Kesadaran. Kesadaran merupakan hal determinan. Meski demikian, kesadaran dapat dikonstruksi dengan repetisi (pengulangan) informasi.

Metode Berpikir Sistem

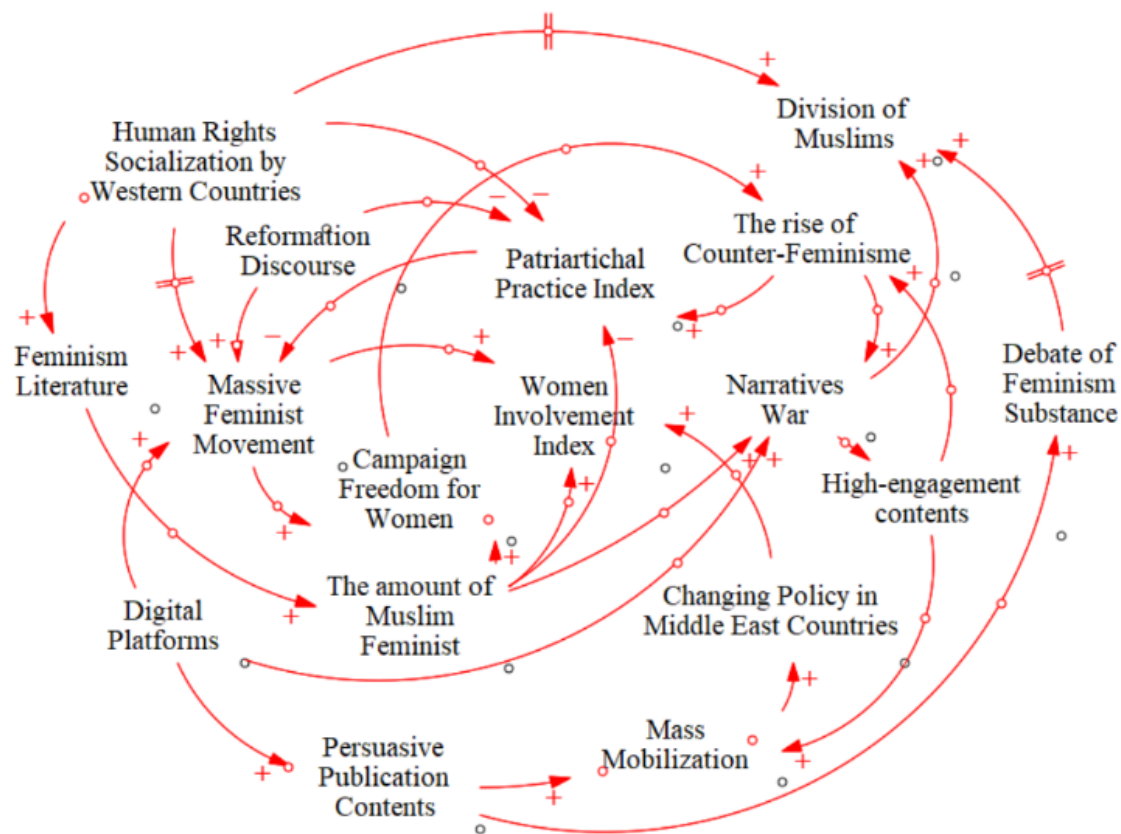
Riset ini mengaplikasikan metode kualitatif dengan pencarian data merujuk pada topik yang diusung, yaitu: perang narasi keagamaan dalam perkembangan feminisme dalam platform digital di kawasan Timur Tengah. Penelitian ini mengeksplorasi kajian literatur yang tersedia dalam arsip daring. Arsip tersebut berasal dari publikasi artikel ilmiah, muatan berita, laporan, dan data resmi dari pemerintahan negara Timur Tengah. Isu permasalahan yang diambil menjadi dasar penting untuk dirumuskannya kebermanfaatan riset atau yang kerap dijuluki "Discovery to Impact" (Trochim et al., 2016).

Penelitian ini menggunakan pendekatan berpikir sistem sebagai landasan untuk melakukan analisis mendalam atau in-depth analysis bagi fenomena yang diamati. Pendekatan berpikir sistem memfasilitasi periset untuk memetakan jamaknya tiga variabel: Interkonektivitas (pola, hubungan dan relasi), mengeksplorasi keberagaman aktor, serta melihat multi-perspektif dari pandangan yang lebih luas (Allen & Kilvington, n.d.). Dalam penulisan artikel, elemen kritis berpikir sistem telah melandasi penulis untuk merumuskan model yang lebih signifikan merepresentasikan kompleksitas yang ada. Penulis melampirkan mental model pada Causal Loop Diagram.

Diadaptasi dari penjabaran langkah yang dikemukakan Sherwood (2002), beberapa hal yang penulis tempuh dalam membuat Causal Loop Diagram adalah: 1) Mengetahui batasan/ limit permasalahan, 2) Menata dari unsur yang menarik, 3) Mengidentifikasi faktor sebab serta faktor akibat, 4) Merumuskan variabel dengan kata benda (bukan kata kerja), 5) Presentasikan hubungan dengan lambang polaritas, serta 6) Memahami tiada diagram loop yang benar-benar selesai. Maka dari itu, setiap dinamika kembali pada limitasi masalah yang diusung (Sherwood, 2002).

Sebagai landasan berpikir sistemik guna menghasilkan analisis mendalam yang lebih akuntabel, periset memasukkan variabel topik ke dalam Causal Loop Diagram. Variabel merupakan kata benda yang dapat terukur peningkatan/penurunannya sebagai hasil umpan balik. Di bawah ini merupakan hasil pemetaan periset dari data rujukan literatur.

Gambar 1. Causal Loop Diagram



Sumber: Penulis, 2021

Terdapat 17 variabel yang diturunkan sebagai nomina terukur dari Teori Perang Narasi yang ditemukan periset dalam pemetaan diagram umpan balik. Ketujuh belas variabel di atas dipilih sebagai derivasi operasional 3 komponen dasar perang narasi: aktor, pola hubungan aktor, dan konten dari perspektif aktor. Periset mengawali loop dengan variabel Human Right Socialization by Western Countries sebagai latar belakang pemantik yang kemudian menjadi faktor sebab bagi dinamika variabel lainnya.

Agenda sosialisasi Hak Asasi Manusia semakin masif dan berkembang di era kontemporer. Agenda tersebut didalangi oleh negara Barat. Bentuk sosialisasi dapat terukur dari program-program dan konvensi (yang kemudian mendorong ratifikasi) seluruh negara untuk secara homogen menyetujui beberapa nilai atau prinsip universal. Semakin meningkat sosialisasi tersebut, semakin tinggi juga pengaruhnya, yakni

terhadap: banyaknya literatur feminisme, agenda reformasi dan lebih lanjut (membutuhkan waktu lama) pada maraknya gerakan feminisme.

Faktor lainnya yang kemudian menjadi akar atau penyebab bagi variabel lainnya adalah perkembangan platform digital. Semakin banyak media sosial seperti Twitter, Facebook, menjadi fasilitas lahirnya konten persuasif yang kemudian mendorong semakin tingginya Perang Narasi. Banyaknya konten yang bernuansa persuasif mendorong mobilisasi massa, untuk kemudian para muslim dibagi ke dalam beberapa kubu (Divisions of Muslims).

Massive Feminist Movement (tingginya pergerakan feminisme) menyebabkan semakin banyaknya kampanye kebebasan untuk para perempuan dan tingginya indeks keterlibatan perempuan di berbagai dimensi (Pendidikan, kursi politik, dan ekonomi). Meski demikian, hal-hal tersebut justru memiliki polaritas positif terhadap pertumbuhan Muslim Kontra-feminis. Hal ini kemudian mendorong semakin kompleksnya perang narasi digital mengenai feminisme di Timur Tengah.

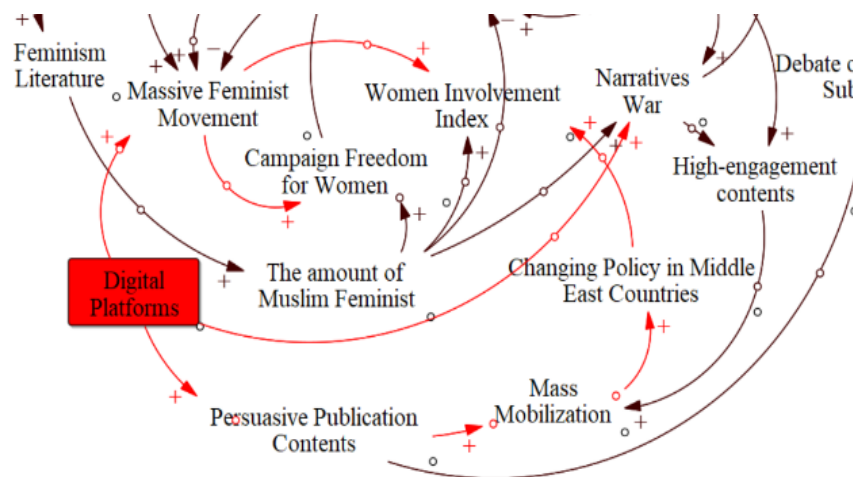
Pada sisi bawah kanan, periset melampirkan variabel Changing Policy (bentuk perubahan kebijakan) di negara-negara Timur Tengah. Hal ini diakibatkan dengan banyaknya massa yang bergerak (Mass Mobilization) oleh sosialisasi konten feminisme (Persuasive Publication Contents). Semakin banyak massa protes dengan legitimasi agenda kesetaraan yang berkembang, semakin banyak ditemui perubahan atau pembaharuan kebijakan di negara seperti Arab Saudi, Mesir, Tunisia yang juga dilanda fenomena Arab Spring (Asseburg, 2012).

Internet Sebagai Platform Perang Narasi Feminisme

Dunia Timur Tengah telah terdampak oleh kekuatan internet yang membentuk sebuah pergerakan dengan kapasitas menurunkan rezim yang tengah memimpin. Proses demokratisasi dalam fenomena Arab Spring membawa isu-isu hak asasi manusia dan kebebasan semakin masif terfasilitasi oleh media digital. Hal ini diperumit dengan karakteristik dunia digital yang menembus batas tanpa konsep teritorial. Interaksi yang ada semakin rumit dan berdasar dari berbagai penetrasi ideologi, latar belakang kultural, hingga keyakinan.

Di dalam lingkup perang tradisional, terdapat kesepakatan internasional mengenai prinsip non-intervensi. Sehingga sebuah negara berdaulat memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan yang paling sesuai dengan konstitusi dan hukum yang ditegakkan. Sedangkan dalam era digital, warga negara, tokoh publik dan bahkan institusi dari negara lain secara signifikan dapat menaruh pengaruhnya (Aline, 2015).

Gambar 2. Bagian 1 Causal Loop Diagram



Sumber: Penulis, 2021

Manifestasi sistem daring ini dipergunakan untuk memberdayakan perempuan di Kawasan Arab dengan konsep feminisme. Para aktivis atau yang kerap disebut sebagai feminis melakukan berbagai upaya dalam ruang virtual, seperti pembuatan web yang melampaui batasan norma lokal yang selanjutnya menjadi halaman mudah akses. Topik bahasan yang diusung juga bersifat kontroversial. Luaran pelayanan ini mayoritas menawarkan perlindungan dan garansi kebebasan (Aline, 2015).

Permintaan untuk melakukan perubahan dalam skema digital di Kawasan Timur Tengah selalu diistilahkan sebagai 'pemberontakan'. Dengan pengumpulan bukti berupa dokumentasi, para aktivis mengunggahnya dan memanfaatkan kekuatan World Wide Web untuk mencari simpati. Hal ini menginisiasi terminologi "Revolusi Twitter". Twitter merupakan media yang sangat berdampak secara sosial politik pada skala dunia. Sistem algoritma twitter yang melakukan pendataan melalui jumlah banyak cuitan menjadikan beberapa isu dengan banyaknya massa sebagai trending.

Narasi yang digaungkan pada satu kubu dapat dengan mudah menjadi hirauan atau tren global, baik dengan penggunaan nama pada tagar tertentu maupun tidak. Beberapa akun seperti Middle Eastern Feminist, Feminist Political Economy of the Middle East and North Africa justru memiliki ratusan pengikut dalam lamannya. Twitter merupakan instrumen yang efektif untuk menggapai tujuan diskursif yang diusung oleh kaum feminisme.

Dalam analisis sampel lebih dari dua juta tweet, didapatkan bahwa pemanfaatan tagar pada Twitter untuk suatu kelompok dapat mengonstruksi setidaknya tiga dampak:

1) Pembentukan dan penegasan identitas, 2) Sebuah proses sirkulasi ulang dari platform lain di luar twitter, dan 3) Membentuk protes publik yang berdampak pada agenda politik (Barker-Plummer & Barker-Plummer, 2017).

Segala pemanfaatan media oleh kubu feminisme dalam menjalankan agendanya merupakan upaya agar para perempuan di kawasan Timur Tengah dapat lebih berpengetahuan. Narasi yang disampaikan dilegitimasi dengan rasionalisasi yang kuat dan menyertakan religiusitas. Pengetahuan yang dimaksud merupakan bentuk keragaman interpretasi beberapa tokoh agamis dengan fatwa "fleksibilitas syariat terhadap zaman". Hal ini yang dirujuk oleh masifnya kelompok-kelompok feminis muslim (Glas & Alexander, 2020). Manifestasi daring ini menuai berbagai pergerakan perempuan di Timur Tengah, di antaranya sebagai berikut.

1. #Women2Drive di Saudi Arabia

Gerakan ini berasal dari video yang marak didiskusikan menjadi tren di platform Youtube mengenai video Mana Al-Sharif, seorang wanita yang mengemudi mobil di Arab Saudi. Pada tahun tersebut (2011), Arab Saudi mengeluarkan pelarangan bagi perempuan untuk menyetir mobil. Ia mengutarakan opininya bahwa wanita harus belajar untuk mengemudi. Namun pemerintahan Arab Saudi justru menangkap dan kasus ini menjadi kajian global tentang bentuk opresi yang dialami wanita di Saudi.

Dalam beberapa bulan, gerakan perempuan untuk mengemudi ini semakin masif di media digital hingga menuai berbagai perhatian pihak eksternal teritorial negara (Baker, 2012). Terjadi beberapa perang narasi antara kaum yang berpegang teguh dengan norma domestik yang cenderung bercorak keyakinan agamis dan kubu reformis. Pada tahun 2014, pemerintah Saudi melakukan konsolidasi dengan para aktivis tagar ini.

2. #NudePhotoRevolutionary di Mesir

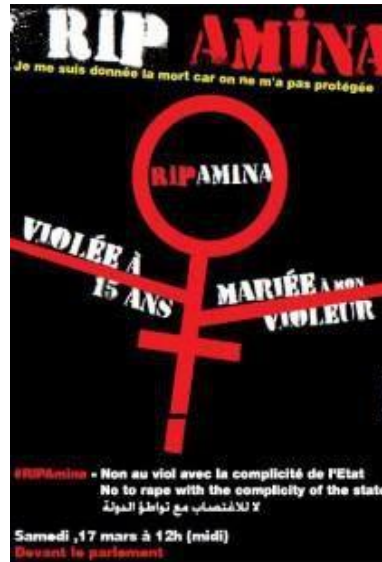
Pergerakan ini bermula dari seorang wanita berumur 20 tahun yang mengunggah foto tidak berbusananya dalam blog pribadi pada tahun 2011. Hal ini dilakukan dengan narasi bahwa tubuh wanita bukanlah objek untuk kebutuhan seksual biologis para lelaki. Hal ini dikuatkan dengan data bahwa Mesir merupakan negara dengan persentase pelecehan seksual sebanyak 80% dalam kesehariannya. Dalam hitungan beberapa menit, foto tersebut viral dan dilabeli dengan tagar #NudePhotoRevolutionary. Foto ini dilihat lebih dari jutaan kali. Dalam perspektif narasi yang dikemukakan oleh pengunggah, Dunia Arab sangat kekurangan edukasi mengenai seks. Sehingga hak tersebut menjadi tabu, Meski demikian, perang narasi tetap masif. Timur Tengah dan lekatnya dengan identitas islamis menolak besar pergerakan ini, terlebih dalam syariat Islam tubuh wanita perlu dilindungi dari sembarang mata yang

diidentifikasi tidak memiliki hak atau ikatan yang sah untuk melihatnya (Fadel Fahmy, 2012).

3. #RIP Amina di Maroko

Tagar ini merupakan pergerakan yang sangat signifikan di dunia digital sehingga dapat merubah komposisi legislatif di Maroko. Amina Filali merupakan wanita remaja berusia 16 tahun yang meracuni dirinya sendiri ketika dipaksa untuk menikah. Pernikahan tersebut merupakan sebuah rancangan dari orang tua Amina Filali. Pihak yang akan dinikahi dengan gadis tersebut merupakan pemerkosa yang dianggap perlu bertanggung jawab demi menyelamatkan kehormatan keluarga Amina (Lalami, 2015).

Gelombang ini semakin masif seiring dengan banyaknya suara “Kita semua adalah Amina”. Hal ini menunjukkan sebuah gejala kumulatif bahwa masyarakat menyampaikan pesan senasib dengan kekangan yang dirasakan Amina. Kubu feminisme mengutarakan banyak narasi dan permintaannya pada rezim terkait. Narasi ini mendorong opini publik dan demo secara fisik terjadi di berbagai belahan negara Maroko. Pergerakan ini dilegitimasi oleh 800.000 tanda tangan pada petisi LSM Avaaz mengenai tinjauan keberlanjutan dari sisi hukum (Avaaz, n.d.).



Gambar 3. Pergerakan RIP Amina di Mesir

Sumber: Knutsen, 2013

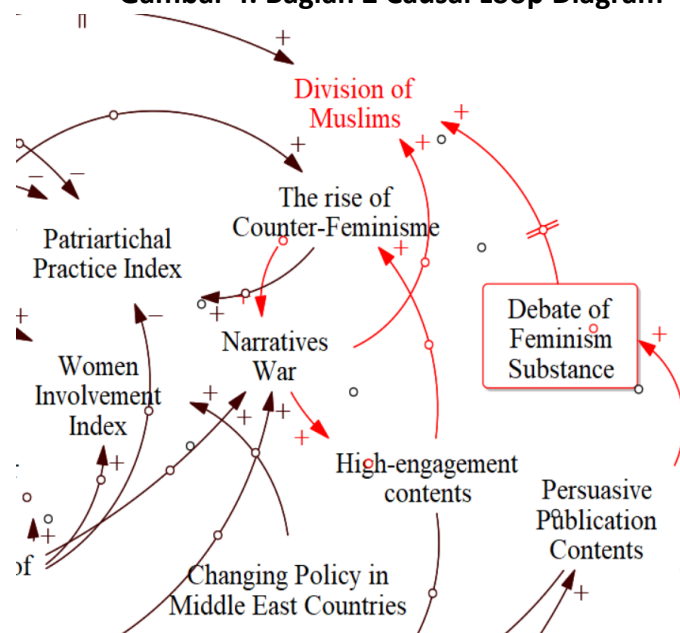
Konten Narasi Perspektif Agama

Terminologi feminisme dalam skema pergerakan di Kawasan Timur Tengah merujuk pada tiga aktor atau kubu yang memiliki diferensiasi premis utama;

1. Kubu feminis sekuler yang cenderung mengikuti arus yang dibawa oleh Barat (Glas & Alexander, 2020). Hadirnya kerangka feminis tersebut ditolak dengan rujukan Kitab Suci umat Islam yakni Al-Qur'an. Para pengamat Timur Tengah memiliki proposisi mengenai sistem patriarki yang mengonsepsikan wanita Timur Tengah sebagai harta kepemilikan. Meski demikian, premis tersebut dipatahkan dengan narasi Kubu konservatif.
2. Kaum konservatif. Kubu yang menginginkan pelestarian nilai murni ajaran Islam dengan aspek historis peran Nabi Muhammad Saw yang hadir dan justru memuliakan kaum wanita yang semula tertindas. Narasi tersebut diperkuat dengan berbagai bukti empiris pengisahan Nabi Muhammad Saw yang hadir sebagai penyatu masyarakat Arab dan membuka jangkauan partisipasi yang lebih luas dalam sistem pemerintahannya (Chakim, 2010).

Berikut merupakan bagian Causal Loop Diagram yang dapat memetakan umpan balik perbedaan narasi yang selanjutnya memberi pengaruh pada pembagian kubu Muslim.

Gambar 4. Bagian 2 Causal Loop Diagram



Sumber: Penulis, 2021

Para kubu kontra-feminisme meyakini bahwa sejatinya kerangka yang dikonstruksi oleh Islam telah berada dalam tahapan yang sempurna dan berlaku hingga hari akhir. Di dalam Al-Qur'an spesifiknya Qur'an Surah Al Ahzab ayat 35, dijelaskan posisi kesetaraan yang mutlak antara status perempuan dan laki-laki di pandangan Tuhan. Meski demikian, kaum kontra-feminis disugahi narasi dan berbagai argumentasi bahwa Islam dan tokoh-tokoh keagamaan (Ulama) tetap mengimplementasikan struktur patriarki yang menganggap posisi laki-laki lebih superior daripada wanita. Hal tersebut dinamai dengan pengistilahan Qawwamun (pemimpin, pendidik dan/atau pembesar) merujuk pada Qur'an Surat An-Nisa ayat 34 (Chakim, 2010).

3. Feminisme muslim. Kubu ini melekatkan skema patriarki dengan beberapa preseden pada laki-laki akan kapasitasnya sebagai ciptaan yang lebih unggul dari sisi fisik, intelektual, maupun mental. Dengannya, wanita diwacanakan memiliki status inferior atau bahkan dikesampingkan. Narasi tersebut menggebu-gebu dan membangkitkan animo perempuan Timur Tengah bahwa mereka juga punya kapasitas untuk memimpin. Kubu kontra-feminis, mengutip pendapat 'Abd al-Wahid (1972) dalam *Al-Islâm wa al-Musykilah al-Jinsiyyah* bahwa wanita didefinisikan bukan sebagai makhluk yang lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki. Diferensiasi yang ada adalah semata-mata karena Islam menjaga wanita dengan sosok lembutnya. Narasi pemuliaan peran wanita ini ditekankan pada muatan tokoh-tokoh islam kontemporer lainnya, seperti: *Al-Bâhî al-Khûlî*, *Ad-Dîn wa Tanzîm al-Usrah*, *Hijâb al-Mar'ah al-Muslimah fi al-Kitâb wa as-Sunnah*, *Al-Islâm wa al-Mar'ah*; Mahmûd Syaltût, dan Sa'id al-Afgani (Sugiyono, 2013).

Terdapat beberapa isu lainnya yang secara masif diperdebatkan antara kubu feminisme muslim dan muslim kontra-feminis. Di antaranya ialah isu kesempatan pendidikan dan kebebasan. Narasi yang dibawa oleh kaum feminisme muslim menyoroti perbedaan kesempatan yang didapat oleh laki-laki dan wanita. Perempuan di Timur Tengah memiliki keterbatasan untuk mendaftar pada bidang-bidang yang lebih dikhususkan pada laki-laki, antara lain; ilmu komputerisasi, kedokteran dan manajemen (Liloia, 2019).

Kubu feminisme menuntut kesetaraan akses dalam hal ini. Pendidikan secara general adalah milik bersama. Tidak hanya rasionalisasi argumen, mereka juga menyertakan rujukan pada ayat Al-Qur'an untuk memperkuat narasi ini; di antaranya Al-Quran Surat Ibrahim ayat 1 dan Al-Qur'an Surat At-Taubah ayat 71 (Muhammad, 2014). Sedangkan kaum kontra-feminis cenderung mempertahankan narasi murni yang

menekankan bahwa wanita menghadapi kondisi sosial kultural yang secara kodrati perlu lebih dilindungi. Salah satu tokoh yang secara gamblang menyampaikan narasi ini adalah al-Abra'syi.

Masyarakat muslim yang menghendaki perubahan dan modernisasi seperti paradigma feminis yang berasal dari Barat, kian membentuk identitas baru yakni sebagai sebuah representasi feminis Islam. Pihaknya merujuk pada Al-Qur'an dengan interpretasi yang lebih luas, berbeda dan fleksibel. Menurut kubu feminisme muslim, dunia Timur perlu lebih berkembang seiring dengan semakin canggihnya dunia global. Kawasan Timur Tengah perlu mengeliminasi rasa asing dan stigmanya kepada Barat dengan asumsi galib bahwa pihaknya membawa ancaman sosial dan moral bagi Dunia Islam.

Identitas feminis muslim ini tidak diklasifikasikan dengan tinjauan partisipasi individu terkait pada pergerakan feminis ataupun dukungannya pada hukum syariah, melainkan klasifikasi ini lagi-lagi menggunakan pendekatan perorangan dengan intersubjektivitas gelar religius pada individu tersebut (Glass & Alexandra 2020).

Kelompok ini mengklaim bahwa mereka tidak menerima konseptualisasi secara apriori melainkan memberdayakan keunggulan yang relevan dengan tetap menganut pada ketentuan agamanya. Meski, dalam tahapan radikal, beberapa pihak berupaya menggemakan suara untuk revisi Kitab Suci. Narasi yang dibawa adalah pendekatan bahwa Al-Qur'an merupakan kitab yang berlaku untuk seluruh waktu dan seluruh umat. Menurut Azizah Al-Hibri, hal ini menjadi konsekuensi bagi Al-Qur'an untuk merespons perubahan.

Baik kubu feminisme muslim maupun muslim kontrafeminis, keduanya menyadari akan ketertinggalannya dari Barat. Hanya saja, terdapat perbedaan solusi yang diusung agar dapat mengejanya. Kubu kontrafeminisme lebih memaknai kemunduran umat Islam dengan jauh dan terpecah belahnya umat Islam pada ketentuan syariat yang seharusnya. Sehingga, solusi ketertinggalan tersebut dapat disiasati dengan kembalinya umat Islam khususnya masyarakat Timur Tengah kepada ajaran Islam yang murni. Narasi ini sangat masif digencarkan oleh gerakan-gerakan yang tersebar di penjuru Timur Tengah hingga skala global, di antaranya: Wahabiyah di Arab Saudi pada interval tahun 1703-1787.

Sebaliknya, kubu feminisme muslim menginterpretasikan ketertinggalan dunia muslim pada Barat dengan perlunya masyarakat Timur Tengah mengikuti jejak modernitas yang telah ditapaki Barat dalam konteks adaptif. Dengannya, reformasi dan perubahan lebih digaungkan daripada untuk kembali pada inti syariat agama.

Tabel 1. Perang Narasi Keagamaan Digital di Timur Tengah

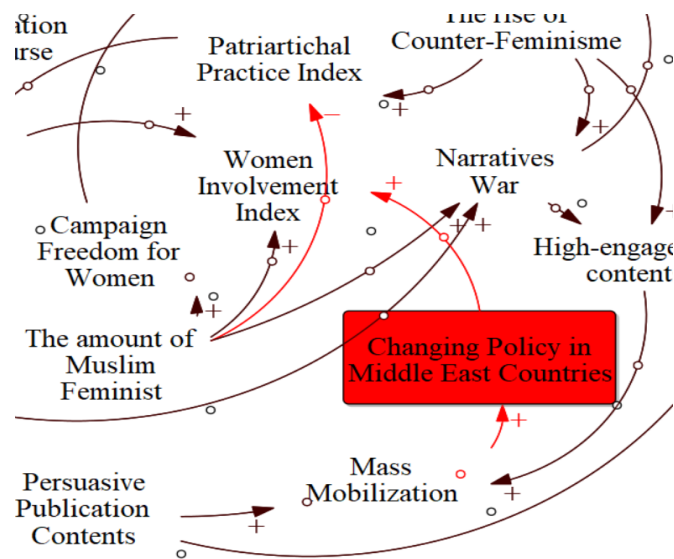
Kelompok	Sekuler	Feminisme Muslim	Muslim Kontrafeminis
Rujukan	Kemajuan Intelektual-Agenda Kesenjangan	Agenda Kesenjangan- Interpretasi Al-Qur'an	Interpretasi Al-Qur'an
Narasi	Hak-hak perempuan	Perempuan cenderung dalam posisi inferior	Perempuan dijaga sesuai fitrah
		Adaptif feminisme dengan konteks ajaran yang fleksibel dengan zaman	Nabi Muhammad S.A.W justru hadir memuliakan wanita
		Rekonsiliasi Modernitas (Upaya mengejar ketertinggalan)	Pemurnian ajaran (Non-Western)

Sumber Tabel: Penulis

Studi Kasus Perubahan Kebijakan

Output signifikan dari adanya perang narasi antar-kubu adalah penarikan massa. Massa yang banyak memiliki kekuatan untuk mendesak perubahan kebijakan. Isu kesetaraan menjadi agenda internasional seiring dengan diberlakukannya sistem multilateralisme di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sistem demokratis dalam arena global pada akhirnya mendorong negara dengan latar belakang kultural apapun untuk turut serta meratifikasi agenda yang diusung bersama. Meskipun setiap suara bersifat tunggal sejajar dari setiap entitas negara berdaulat, tidak dapat dipungkiri bahwa terdapat beberapa pihak yang memimpin suara dan agenda, di antaranya Amerika Serikat sebagai negara hegemon dan dewan keamanan permanen Perserikatan Bangsa-Bangsa. Prinsip dasar Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah kedamaian dunia. Hal tersebut dipercayai akan hadir terbangun dengan tipe bangsa yang demokratis. Sebaliknya, rezim yang tidak demokratis akan cenderung kontra dengan kedamaian global yang menjunjung tinggi nilai hak asasi (Chomsky, 2006).

Berdasarkan bagian *Causal Loop Diagram* berikut ini (Gambar 5), didapati bahwa pengaruh tingginya mobilisasi massa yang tercipta dari narasi persuasif mempengaruhi pembaharuan kebijakan. Semakin interaktif narasi yang secara masif dilakukan, semakin banyak repetisi yang dipraktekkan melalui tagar (hashtags), maka akan semakin signifikan narasi tersebut memenangkan pertarungan (dengan output perubahan kebijakan) (Fanenbruck, 2010).

Gambar 5. Bagian 3 Causal Loop Diagram**Sumber: Penulis, 2021**

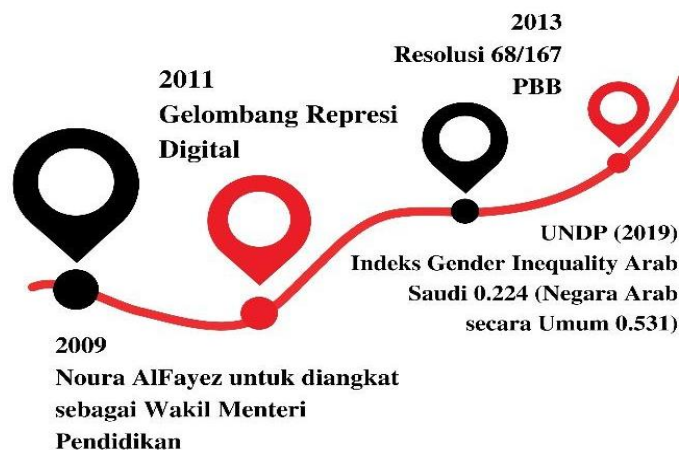
Sejak tahun 1979, organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa merujuk pada Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW). Konvensi ini diadopsi dengan tujuan melindungi hak perempuan dan melegitimasi hak kesetaraan padanya. Konvensi ini bersifat multidimensi; politik, pekerjaan, kesehatan, akses publik, dan lainnya. Konvensi ini didukung banyak negara sehingga akhirnya menjadi norma baru yang kukuh. Negara-negara perlahan merubah kebijakan nasional dan mengamandemen hukum yang ada. Lembaga Swadaya Masyarakat lokal semakin aktif dan menjadikan Komite CEDAW sebagai titik pelaporan bentuk anti-kesetaraan. Pengaruh dari konvensi ini sangat luas, sehingga isu kesetaraan dapat menjadi suatu kajian prioritas (Qodarsasi, 2014). Dalam menegakkan agenda kesetaraan ini, Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui konvensi CEDAW memiliki skema atau prosedur pelaporan tersendiri. Dalam hal ini lembaga hukum internasional memiliki kapasitas mengadili negara (dengan hukum domestiknya) untuk turut mengikuti arah dan luaran konvensi.

Pada tahun 2004, Komite Hak Asasi Manusia menyuarakan kritisme lanjutan dari Komisi Hak Anak (2003) mengenai hukum nasional di Negara Islam Maroko. Hukum tersebut berbunyi apabila seorang anak lahir dari seorang ibu dan bapak yang bukan warga negara Maroko maka secara hukum anak tersebut tidak memiliki kapasitas untuk mengklaim status warga negara Maroko. Sehingga pada tahun 2010 pemerintah Maroko

mulai ditekan untuk menetapkan keadilan bagi perempuan yang menikah dengan non-warga agar anaknya diakui.

Secara kumulatif, konvensi ini telah banyak berperan dan memaksa negara-negara untuk turut patuh pada kesetaraan (Byrnes & Freeman, 2012). Konvensi CEDAW dan banyak perangkat kesetaraan lainnya telah masuk ke dalam negara-negara muslim yang diidentikkan memiliki sistem dan struktur peran perempuan tersendiri. Meski demikian, persentase para warga yang menyambut agenda dan pergerakan ini justru lebih masif dibandingkan dengan pihak kontra. Menurut sosiolog Ronaldo (2014), Elder (1994), dan Sewel (1992), beberapa negara Arab secara iklim norma lebih siap untuk mengeliminasi konsep patriarki yang dilekatkan dengan skema struktural islam (Zion-Waldoks, 2014).

Gambar 6. Perkembangan Kebijakan Menyangkut Perempuan di Arab Saudi



Sumber: Penulis, 2021

Arab Saudi merupakan negara yang memiliki dua kota suci umat muslim dunia; Mekah dan Madinah. Dengan demikian, identitas islam sangatlah melekat dengan negara ini. Arab Saudi merupakan negara berdaulat yang tidak pernah dijajah oleh negara kolonial Eropa. Meski demikian, wacana feminisme yang semula berasal dari Barat tetap sampai dan berperan di dalam dinamika domestik negara Arab Saudi.

Di bawah kepemimpinan Raja Abdullah pada tahun 2009, Noura Al-Fayez diangkat menjadi Wakil Menteri Pendidikan. Keputusan menaruh peran perempuan dalam parlemen kenegaraan ini merupakan suatu skema perubahan yang mendukung bagi aktivis feminisme. Hal ini menjadi batu loncatan dan optimisme baru untuk meraup negara-negara muslim lainnya mengaplikasikan agenda kesetaraan universal yang telah disepakati secara internasional. Meski demikian, sejauh ini kubu kontra-feminisme masih mendominasi Arab Saudi. Perjuangan kaum feminisme masih terhalang secara signifikan dengan keberadaan tokoh-tokoh agama. Narasi yang dibawahnya masih terkubur secara inferior. Dalam hal ini, gerakan feminis hadir dan masih menggunakan pendekatan perorangan atau individu. Hal tersebut dikarenakan pemerintah Arab Saudi masih membatasi keberadaan organisasi massa/sipil secara ketat (Alva, 2020).

Pada tahun 2011 yang dikenal sebagai masa internet meruntuhkan rezim otoriter atau fenomena demokratisasi Arab Spring, pemuda di Arab Saudi juga menggelarkan demonya melalui platform media sosial. Mereka menuntut perubahan pada otoritas lokal dengan kritik yang dituangkan dalam muatan berbasis web. Gelombang Arab Spring ini lahir dari Tunisia. Namun memiliki dampak keberlanjutan bagi satu Kawasan Timur Tengah secara kumulatif, karena memiliki keadaan kultural dan sosial politik yang beragam. Kekuatan represi digital ini terukur sangat kuat, sehingga beberapa rezim runtuh dengan tidak terlepasnya intervensi para negara hegemon dengan agenda demokratisasinya.

Dalam menghadapi berbagai penekanan dari masyarakat, pemerintah Arab Saudi mulai melakukan adaptasi dengan menerapkan langkah-langkah pembaharuan regulasi, spesifiknya mengenai isu perempuan (Alzahrani, n.d.). Dengan hal ini, pada tahun 2013 Arab Saudi mengadopsi resolusi 68/167 Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai hak asasi manusia. Resolusi ini berfokus pada privasi para individu di era digital. Negara otoriter cenderung mengintai komunikasi sosial media. Resolusi ini berasal dari Amerika Serikat dan sekutu negara Barat yang menginisiasi instrumen ini menjadi hukum universal (Andika, 2014).

Arab Saudi, salah satu negara yang kuat identitas muslimnya turut bersifat lentur dan adaptif terhadap pergerakan reformis, terkhusus suara feminisme (UNDP, 2020). Meski demikian, para kubu muslim feminis tetap menganggap tokoh agama di negara Arab Saudi dan secara umumnya di Kawasan Timur Tengah sebagai kaum konservatif yang melakukan penolakan pada perubahan yang diusung oleh paradigma modern. Kebebasan perempuan untuk berada di sektor-sektor publik masih secara masif ditentang dengan narasi dan rujukan agama. Dalam hal ini, kubu pro-feminis menjawabnya dengan rasionalisasi dan fleksibilitas Al-Qur'an atau syariat Islam terhadap perubahan zaman. Ulil Amri atau pemerintahan Saudi juga turut melakukan

sedikit demi sedikit perubahan dari pembatasan hak yang semula diberlakukan pada perempuan.

Simpulan

Era digital hadir dan menyuguhkan skema terbaru dari perang. Berbeda dengan baku tembak senjata yang cenderung berada pada isu politik tinggi tradisional, arus masif internet menjadi sarana adu opini dan strategi narasi bagi masing-masing kubu untuk selanjutnya menargetkan banyak massa. Hal ini terjadi pada kubu pro-feminisme yang pada periode kontemporer cenderung berlabel kubu reformis. Timur Tengah menjadi kawasan yang dinamikanya sangat terpengaruh oleh perang narasi antara tiga kubu. Narasi perang digital mengenai kesetaraan perempuan di Timur Tengah melibatkan kubu 1) Feminis sekuler, 2) Muslim konservatif dengan narasi pemegangan teguh (pemurnian) ajaran Islam tanpa pengaruh paradigma eksternal, dan 3) Muslim Feminis dengan narasi fleksibilitas Islam untuk mengikuti modernitas demi mengejar ketertinggalan.

Riset ini berfokus pada perbedaan narasi yang juga dilegitimasi oleh masing-masing kubu dengan rujukan agama. Titik diferensiasi perdebatan ada pada perbedaan interpretasi ketiga kubu, utamanya kubu 2 & 3 yang sama-sama lahir dari para individu muslim religius. Terdapat perbedaan cara tafsir kitab agama dan rujukan fatwa. Perang narasi ini bergerak dinamis di Timur Tengah, terlebih pada era digital yang merupakan gelombang ketiga feminisme yang bertransmisi dari dunia Barat. Feminisme lahir beriringan dengan isu hak asasi dan lahirnya fokus kebebasan bagi setiap individu untuk diakui sebagai entitas yang setara dengan penuh hormat.

Daftar Pustaka

- Abu-Lughod, L. (2001). Orientalism and Middle East Feminist Studies. *Feminist Studies*, [online] 27(1). Dalam: https://tavaana.org/sites/default/files/orientalism_0.pdf [Diakses 10 Mei 2020].
- Aline, S. (2015). Digital activism for women's rights in the Arab World. 1–18. [online] Dalam: http://womeninwar.org/wordpress/wp-content/uploads/2015/08/Beirut/8/Aline%20Sara_Digital%20Activism%20for%20women's%20rights%20in%20the%20Arab%20World.pdf [Diakses 15 Mei 2022].
- Allen, W., & Kilvington, M. (n.d.). An introduction to systems thinking and systemic design concepts and tools. [online] Dalam:

- <https://learningforsustainability.net/pubs/systemicdesign-intro.pdf> [Diakses 10 Mei 2022].
- Alva, A. (2020). Perempuan Arab Saudi dari Waktu ke Waktu. [online] Faktual News. Dalam: <https://faktualnews.co/2020/01/04/perempuan-arab-saudi-dari-waktu-ke-waktu/185610/> [Diakses 10 Mei 2022].
- Alzahrani, Y. (n.d.). Saudi Arabia and the Arab spring: Reshaping saudi security doctrine. Naif Arab University for Security Sciences. [online] Dalam: https://www.researchgate.net/publication/291877961_Saudi_Arabia_and_the_Arab_spring_Reshaping_saudi_security_doctrine [Diakses 22 Mei 2022].
- Andika, T. (2014). Perlindungan Kedaulatan Negara di Bidang Informasi Dalam Aktivitas Penyesuaian Antar Negara Berdasarkan Hukum Internasional dan Hukum Nasional. [online] Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Padjajaran. Dalam: <http://pustaka.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2014/12/jurnal.pdf> [Diakses 20 April 2022].
- Arnold, R. D., & Wade, J. P. (2015). A definition of systems thinking: A systems approach. *Procedia Computer Science*, [online] 44(C), 669–678. Dalam: <https://doi.org/10.1016/j.procs.2015.03.050> [Diakses 12 April 2022].
- Asseburg, M. (2012). Protest, Revolt and Regime Change in the Arab World. SWP Research Paper, February, 15–17. [online] Dalam: https://www.swp-berlin.org/fileadmin/contents/products/research_papers/2012_RP06_ass.pdf [Diakses 10 Maret 2022].
- Avaaz. (n.d.). Avaaz RIP Amina Petition. [online] Dalam: https://secure.avaaz.org/campaign/en/forced_to_marry_her_rapist_b/ [Diakses 5 Maret 2022].
- Baker, A. (2012). Manal Al-Sharif - The World's 100 Most Influential People. [online] Dalam: http://content.time.com/time/specials/packages/printout/0,29239,2111975_2111976_2112132,00.html [Diakses 10 Maret 2022].
- Barker-Plummer, B., & Barker-Plummer, D. (2017). Twitter as a Feminist Resource: #YesAllWomen, Digital Platforms, and Discursive Social Change (Issue December). [online] Dalam: <https://doi.org/10.1108/s2050-206020170000014010> [Diakses 20 Maret 2022].

- Behrooz, A. (2016). 10 Must Read Women Writers From The Middle East. [online] Dalam: <https://theculturetrip.com/middle-east/articles/10-must-read-female-writers-from-the-middle-east/> [Diakses 9 Maret 2022].
- Bruer, J., Went, R., & Quandt, T. (2012). Digital War: An empirical analysis of narrative element in military first-person Shooters. *Journal of Gaming & Vitrua World*, [online] 4(3), 215–237. Dalam: <https://doi.org/10.1386> [Diakses 10 Februari 2022].
- Byrnes, A., & Freeman, M. (2012). The Impact of the CEDAW Convention: Paths to Equality. [online] *World Development Report Gender Equality and Development*. Dalam: <https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/9219/WDR2012-0014.pdf> [Diakses 5 Januari 2022].
- Boizot, J. (2019). Feminism and media, opportunities and limitations of digital practice. [online] Dalam: <https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1483333/FULLTEXT01.pdf> [Diakses 10 Januari 2022].
- Chakim, S. (2010). Interkoneksi Feminisme Muslim dan Gerakan Pembaruan di Timur Tengah. *YINYANG Jurnal Studi Gender & Anak*, [online] Vol. 5, No.2. Dalam: <https://ejournal.uinsaizu.ac.id/index.php/yinyang/article/view/277/244> [Diakses 20 Januari 2022].
- Chomsky, N. (2006). *Failed States: The Abuse of Power and the Assault on Democracy*. Canada: American Empire Project
- Colley, T. (2015). Strategic Narratives, Public Opinion and War: Winning Domestic Support for the Afghan War. *Media, War & Conflict*, [online] Vol. 9(2). Dalam: <https://doi.org/DOI.10.1177> [Diakses 1 Januari 2022].
- Dimitriu, G., & de Graaf, B. (2015). *Strategic Narratives, Public Opinion and War: Winning domestic support for Afghan War (Contemporary Security Studies)*. London: Routledge.
- Fadel Fahmy, M. (2012). Egyptian Blogger Aliaa Elmahdy: Why I Posed Naked. [online] CNN. Dalam: <https://edition.cnn.com/2011/11/19/world/meast/nude-blogger-aliaa-magda-elmahdy/index.html> [Diakses 1 Januari 2022].
- Fanenbruck, G. (2010). *The Role of New Media in Protest Organisation: A Case Study of “The Wave” climate change protest in London, UK, 5th December 2009*. Rotterdam: Erasmus University Rotterdam.

- Glas, S., & Alexander, A. (2020). Explaining Support for Muslim Feminism in the Arab Middle East and North Africa. *SAGE Journals*, [online] Vol 34, No (gender & Society). Dalam: <https://doi.org/10.1177/0891243220915494> [Diakses 10 Februari 2022].
- Harding, S. (1986). *The Science Question in Feminism*. New York: Cornell University.
- Jazzar, R. (2011). The Egyptian Women's Movement Identity Politics and the Process of Liberation in the Nineteenth and Twentieth Centuries. [online] Dalam: https://repository.asu.edu/attachments/93157/content/tmp/package-jz438Z/Jazzar_asu_0010N_11098.pdf [Diakses 20 Januari 2022].
- Kandiyoti, D., Hammami, R., & Taraki, L. (1995). Gender and Feminist Scholarship in the Middle East (1995). *Gender and Society-Working Papers*. [online] Dalam: <http://iws.birzeit.edu/sites/default/files/2016-10/Gender%20%26%20Feminist%20Scholarship%20in%20the%20Middle%20East-1.pdf> [Diakses 10 Maret 2022].
- Knutsen, E. (2013). After Girl's Death, Morocco Will Change Rape Laws. [online] Dalam: <https://www.forbes.com/sites/eliseknutsen/2013/02/04/after-girls-death-morocco-will-change-rape-laws/?sh=2ad2ef6c4adb> [Diakses 20 Maret 2022].
- Kruglova, A. (2020). I Will Tell You the Story about Jihad": ISIS' Propaganda and Narrative Advertising. *Studies in Conflict and Terrorism*, [online] 44(2), 1–23. Dalam: <https://doi.org/10.1080> [Diakses 23 Maret 2022].
- Lalami, L. (2012). A Rape Victim's Suicide Proves Morocco's Culture of Silence Must Go. [online] Dalam: <https://thedailybeast.com/a-rape-victims-suicide-proves-moroccos-culture-of-silence-must-go> [Diakses 10 Maret 2022].
- Liloia, A. (2019). Perempuan Arab Saudi sedang berjuang untuk kebebasan - dan kesuksesan mereka. [online] Dalam: <https://theconversation.com/perempuan-arab-saudi-sedang-berjuang-untuk-kebebasan-dan-kesuksesan-mereka-terus-bertambah-122269> [Diakses 23 Maret 2022].
- Muhammad, H. (2014). Islam dan Pendidikan Perempuan. *Jurnal Pendidikan Islam*, [online] 3(2), 231. Dalam: <https://doi.org/10.14421/jpi.2014.32.231-244> [Diakses 20 Maret 2022].
- OECD. (2018). Empowering women in the digital age. [online] Dalam: https://www.g20-insights.org/policy_briefs/empowering-women-digital-age/ [Diakses 20 April 2022].

- Qodarsasi, U. (2014). Penyelesaian Kasus Kekerasan Terhadap Tenaga Kerja Wanita Indonesia di Malaysia Melalui Implementasi Konvensi CEDAW PBB 1979. *Palastren Jurnal Studi Gender*, [online] 7(1), 169–192. Dalam: <http://dx.doi.org/10.21043/palastren.v7i1.1003> [Diakses 20 April 2022].
- Rickli, J., & Kaspersen, A. (2016). The Global War of Narratives and the Social Media. [online] Dalam: <https://www.weforum.org/agenda/2016/07/the-global-war-of-narratives-and-the-role-of-social-media/> [Diakses 20 April 2022].
- Sarasi, V., Yulianti, D., & Farras, J. I. (2014). Pengantar Berpikir Sistem. *Paper Knowledge: Toward a Media History of Documents*, Vol. 5, Issue 2.
- Sherwood, D. (2002). Seeing The Forest for The Trees. [online] Dalam: <https://www.scribd.com/document/532674554/Sherwood-Cap-4-2002> [Diakses 20 April 2022].
- Sugiyono, S. (2013). Feminisme di Dunia Muslim: Menguak Akar Perdebatan antara Paham Konservatif dan Reformis. *Thaqafiyyat*, [online] Vol. 14. No. 1. Dalam: http://ejournal.uin-suka.ac.id/adab/thaqafiyyat/article/view/615/pdf_20 [Diakses 22 Mei 2022].
- Trochim, W. M., Donnelly, J. P., & Arora, K. (2016). *Research Methods*. Boston: CENGAGE Learning.
- UNDP. (2020). The Next Frontier: Human Development and the Anthropocene. *Human Development Report 2020*, 130–158. [online] Dalam: <http://hdr.undp.org/en/2020-report> [Diakses 20 April 2022].
- Whitcher, R. (2005). The effects of western feminist ideology on Muslim feminists. [online] Dalam: <https://core.ac.uk/download/pdf/36695989.pdf> [Diakses 23 Mei 2022].
- Younis, M. (2007). Daughters of the Nile: The Evolution of Feminism in Egypt. *Washington and Lee Journal of Civil Rights and Social Justice*, [online] 13(2), 9. Dalam: <https://scholarlycommons.law.wlu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1228&context=crsj> [Diakses 20 April 2022].
- Zion-Waldoks, T. (2014). Politics of Devoted Resistance: Agency, Feminism, and Religion among Orthodox Agunah Activists in Israel. *Gender & Society*, [online] 29(1): 73-97. Dalam: <https://doi.org/10.1177/0891243214549353> [Diakses 25 April 2022].